**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU**

Oleh : *Heri Anjar Setio*

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jalan Pemuda Gang Masjid Baiturrahman Kel Tirta Siak, Kec Payung

Sekaki, Kota Pekanbaru - Riau

Email: kyrockyky@gmail.com

ABSTRACT

The AGO is not only in charge of prosecution, but also as executor of the judge's decision which has obtained permanent legal force, as regulated in Article 270 of the Criminal Procedure Code which appoints the prosecutor as the executor of the court decision. Therefore the Public Prosecutor's Office Indragiri Hulu in addition to the prosecution of criminal acts, also focused on the evidence that has been picked on the content of court decisions. Which is known in terms of execution of judicial decisions by judges about the evidence is so under-emphasized because in the case of the trial, the defendant in the case of the criminal act is focused. Judging from its authority, the prosecutor's office has the right in returning the evidence which has been listed by the judge in the execution of the court decision whether it belongs to the defendant or the victim, judging from the storage place of the evidenced so much, the writer is interested to examine the execution of the judge's verdict which has the permanent legal force for the return of evidence at the Indragiri Hulu State Prosecutor Office.

The researcher wants to study and answer the problem of how the execution of the judge's decision which has the permanent legal force over the return of the evidence? as well as the barriers that occur in the implementation of the return of evidence that has obtained legal force remains? and also how the efforts undertaken in overcoming the barrier of return of evidence that has obtained legal force remains?

The method that writer use is by method of sociological approach with collecting data as follows: literature study, document study, and interview.

The results of the study and discussion can be concluded that the judge made a letter of passage of the verdict, the decisions came out 1 week after the verdict was read by the judge. The petition of the verdict is then granted to the prosecutor for the prosecutor to prepare the minutes of the judge's determination (BA-6) and make the report of the evidence-taking event (BA-20), then (BA-6) and (BA-20) awarded to the defendant or party which is mentioned in the contents of the decisions made by the judge, because the minutes of the proceedings constitute notification of the collection of evidence as stated in the contents of the decision in the Prosecution or RUPBASAN. Constraints in the implementation of the return of evidence by the prosecutor that the lack of clarity of the address to the owner of the evidence, the vehicle is still a credit, and the period of return of evidence has not been set in concrete causing the storage space of evidence becomes full, Suggestion case author who has received the decision of Inkracht Prosecutor the executor of the judge's verdict shall promptly return the evidence to the person mentioned in the content of the decision or those who are entitled in accordance with the laws governing it. As well as the addition and renewal of infrastructure to minimize the accumulation of evidence at the AGO and RUPBASAN.

Keywords: Procurator - Goods Proven - Judge's Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti yang mana bukti-bukti tersebut diperuntukan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :¹

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.² Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.³

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.

Ketentuan mengenai pengembalian barang bukti oleh jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 ayat (8) yaitu: Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan berita acara. Artinya setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan maka jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama pada bagian pengembalian barang bukti. Apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi penumpukan barang bukti yang merupakan hak dari penerima barang bukti.

Kemudian Pasal 54 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana.

maka pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan. Karena disinilah penegakan keadilan yang sebenarnya. Terutama kaitanya dengan barang bukti. Bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar barang bukti tidak terlalu lama disimpan dan akhirnya biasa mengurangi nilai dan manfaat barang jika seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sudarto Semua ini dimaksud untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

¹Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.214.

³ *Ibid.*

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 227.

Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti apa pelaksanaan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang mana untuk mencegah dari pada penumpukan barang bukti dan penelitian ini diberi judul **“Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini mengacu kepada rumusan permasalahan diatas. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang pelaksanaan pengembalian barang bukti.
3. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat dalam

mencari solusi terhadap permasalahan pengembalian barang bukti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Sayangnya, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga disepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dari makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.⁵

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut sudut pandangan subjektif (untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan : orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.

Menurut defenisi praktisi keadilan dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan hak yang melekat padanya atau memberikan sesuai dengan takaran tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Banyak para sarjana beranggapan bahwa keadilan itu bukanlah sesuatu yang “harus” namun sesuatu yang “seharusnya” hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Benyamin N Cordozo bahwa keadilan itu merupakan proses yang tidak pernah ada akhirnya dan selalu menjadi usaha pencapaian dari para penegak keadilan.⁶

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban: yaitu kehidupan berinteraksi antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud menjadi pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus

⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.77.

⁶Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawuringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Penegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung , Alfabeta,2013, hlm. 12-13.

ditempuh oleh masyarakat ialah dengan jalan menegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.⁷

Dalam modelnya kita menganut model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan yang mana dalam model ini disebut model keseimbangan kepentingan. Keadilan tidak dapat digapai, apabila kepastian tidak dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu, apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan, memang merupakan suatu delik.⁸

2. Konsep Pelaksanaan Putusan

Mukti Arto mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum.⁹ Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tersangka secara pribadi atau dimana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dimana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang

berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan dalam pengadilan secara utuh.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Adapun konsep-konsep tersebut :

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹
2. Putusan Hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amarpidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹²
3. (*Inkracht*) adalah Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.¹³
4. Barang Bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹⁴
5. Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu adalah kejaksaan negeri yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.

¹⁰ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2006, hlm. 132.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 488.

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007. hal 127

¹³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm. 226.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta: 2007, hlm. 47.

⁷ Production Sharing Contact, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

⁸ E. Fernando M. Manullang, *Mengapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antimoni Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 101.

⁹ M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu terjadi permasalahan di bidang barang bukti yang mana dalam kasusnya putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap namun belum juga di kembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dilokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Inhu
2. Jaksa Pidana Umum
3. Staf Pidana Umum

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁶ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu	1	1	100 %
2	Jaksa Pidana Umum	2	1	50%
3	Staf Pidana Umum	5	2	40%
Total		8	4	-

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

1) **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER -036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁷

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari internet yang mendukung data primer dan sekunder.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a) **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b) **Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan

dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Sedangkan metode berfikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 Butir 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengambilan putusan hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁹

2. Jenis Putusan Hakim

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada 3 macam:

a. Putusan Bebas (*Vrijspaark*)

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 167.

terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan dilepas (*Oslag van alle Rechtvervolging*)

Terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan pemidanaan

Terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

3. Tujuan Putusan Hakim

Secara praktik tujuan adanya putusan pada peradiln pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakawa mempunyai kedudukan atas statusnya dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan dan
3. Kepastian

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.²⁰ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang

²⁰Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 3.

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.²¹

Lebih lanjut, Munir Fuady mendefenisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang di persengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.²²Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berpekar. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*” sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti “*beyond reasonable doubt*”.²³

2. Teori Dalam Sistem Pembuktian

Ada 4 teori dalam sitem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

a. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar dari Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat

²¹M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 273.

²² H.P. Pangabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

²³ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Bandung, 2013, hlm. 214.

menurut peraturan pembuktian yang keras”²⁴.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.²⁵

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.²⁶

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijs theotrie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya

terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut atau sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, karena dalam proses nya masyarakat ingin sekali dalam pelaksanaan tersebut dapat cepat terealisasi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya sehingga rasa keadilan serta kebutuhan akan hukum itu benar-benar dapat terpenuhi. Perkembangan hukum di Indonesia terkesan lambat dalam hal pelaksanaannya, yang mana dapat dicontohkan dalam pengembalian barang bukti pada instansi kejaksaan yang mana telah memperoleh putusan yang *inkracht* ataupun putusan akhir pada pengadilan negeri yang mana telah melalui segala proses-proses peradilan yang ada.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan

²⁴Andi Sofyan, *Op Cit*, hlm. 245.

²⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

²⁶*Ibid*, hlm. 171.

²⁷Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39.

negeri.²⁸ Hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahan terbukti secara sah menurut aturan yang berlaku.²⁹ Dalam suatu peradilan transparansi dan akuntabilitas suatu putusan hakim merupakan perwujudan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia demi terwujudnya *good governance*. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang sesuatu putusan yang sedang berjalan di muka pengadilan ataupun sebagai pertanggung jawaban seorang hakim atas putusan yang dijatuhkannya.

Sejatinya putusan hakim memang harus dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pihak-pihak, yaitu pihak yang berperkara, publik, pengadilan tingkat banding, kejaksaan, ilmu pengetahuan, Negara dan bangsa, yang tak kalah pentingnya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ dalam putusan hakim pada akhirnya tak lepas dari pembahasan mengenai barang bukti sebagai alat dari pembuktian, barang bukti adalah barang mengenai delik dilakukan (obyek) delik dan barang dengan nama delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.³¹

Dari keterangan yang di berikan oleh Ibu Siti Rahayu selaku jaksa penuntut umum yang menjelaskan tentang pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidanaseperti mekanisme dalam bagan diatas yang mana terdapat penjelasannya mengenai pengembalian barang bukti oleh jaksa yaitu :

“Sesudah putusan pengadilan perkara yang sudah mendapat putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) maka berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala

Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan perintah pengembalian barang bukti, lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht*, petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA- 6), dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA- 20). Setelah itu berita acara tersebut diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20) digunakan untuk mengambil barang bukti yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara)”³²

Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkewajiban dalam mengembalikan barang bukti sitaan yang mana telah disebut kan pada putusan pengadilan yang telah dipakai sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi dan atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana. Maka dari itu pada tingkat putusan yang mana hakim telah memutuskan bahwasanya yang bersangkutan dengan barang bukti telah menjadi hak dan wewenang pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus mengembalikan kepada pihak yang paling berhak jika pada tingkatan putusan sudah *inkracht*.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup, jaksa penuntut umum langsung mngembalikan barang bukti tersebut kepada orang yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, pengembalian barang bukti dilakukan dengan berita acara. Menurut ibu Siti Rahayu surat berita acara pengambilan barang bukti (B – 20)di serahkan kepada pihak Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) ataupun langsung

³²Wawancara dengan Ibu Siti Rahayu, Jaksa Penuntut Umum, 24 oktober 2017, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

²⁸Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 123.

²⁹ Danielle Geraldine, “The Role Of Evidence In The Settlement Of Criminal, Crishtoper, Vit as 273,1980, “*Jurnal West Law*”, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 november 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³⁰ Muntasir Syukri, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas*, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/>, 01 November 2017.

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 169.

diberikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya.³³

Mengenai pengembalian barang bukti yang diatur dalam pasal 46 KUHAP yaitu menyatakan bahwa :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c. Perkara tersebut di kesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat di kembalikan dalam hal perkara tersebut di hentikan penyidikan atau penuntutannya akan tetapi dapat juga di kembalikan pada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah di periksa disidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

³³Wawancara dengan Ibu Siti Rahayu, Jaksa Penuntut Umum, 24 oktober 2017, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Dalam barang bukti yang terdapat di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terdapat data yang peneliti dapatkan berupa jumlah perkara serta barang buktinya yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.2
Jumlah Perkara dan Jumlah Barang Bukti di
Kejaksaan Priode 2016/2017

TAHUN		2016	2017
1	JUMLAH PERKARA DI KEJAKSAAN	177	90
2	JUMLAH BARANG BUKTI SITAAN	142	67

Sumber : Data Primer Olahan Tahun
2016/2017

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah perkara pada data di kejaksaan serta barang buktinya selama priode 2016/2017, untuk perkaranya berjumlah 267 perkara, sedangkan pada barang bukti berjumlah 209 unit barang bukti yang mana sebagian besar barang bukti tersebut belum dikembalikan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Dalam proses penanganan serta penangulungan dari pada masalah barang bukti tentu banyak hal-hal yang perlu dilakukan, maka dalam pelaksanaannya tak jarang juga banyak hambatan ataupun kendala yang di jumpai pihak jaksa selaku pelaksana pengembalian barang bukti tersebut. Dari hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian hambatan-hambatan pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan yang mana dalam fasilitas ruangan gudang tempat penyimpanan barang bukti itu di letakan masih sangat lah berukuran kecil jika dilihat dari jumlah barang bukti seperti kendaraan bermotor yang sangatlah banyak di gudang tersebut yang sampai menumpuk serta dalam perawatan pun juga tidak ada dalam artian barang bukti tersebut seperti terbengkalai menumpuk di gudang tersebut.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Encik selaku staf bagian pidana umum bagian barang bukti, mengenai kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam pengembalian barang bukti adalah : kurang jelasnya daripada alamat pemilik penerima

barang bukti tersebut yang mengakibatkan pihak jaksa kesulitan dalam mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya, menunggu terdakwa bebas bila mana dalam putusan tercantum nama terdakwa yang berhak dalam menerima barang bukti tersebut sehingga butuh yang lama dalam mengembalikannya, dan kendaraan yang masih dalam masa kredit.³⁴

Tenggang waktu yang diperlukan oleh jaksa dalam penyimpanan barang bukti yaitu “berdasarkan putusan pengadilan, setelah adanya putusan *inkracht* (keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) jaksa langsung melaksanakan tugas untuk mengembalikan barang bukti ke orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan. Jaksa akan diberikan petikan putusan lalu membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20).³⁵

Dari pernyataan di atas jelas bahwa diketahui dalam hal jangka waktu belum ada undang-undang yang mengatur dalam jangka waktu pengembalian barang bukti sehingga barang bukti yang seharusnya dalam putusan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dapat di selesaikan secara tuntas akan tetapi dengan adanya kendala yang di sebutkan oleh pihak jaksa tersebut maka barang bukti yang di sita bisa selalu bertambah dan terus menumpuk baik itu di gudang kejaksaan maupun di RUPBASAN itu sendiri.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam Putusan Pengadilan Rengat Nomor 456/PID/B/2016/PN.RGT atas nama terdakwa Fanolo Telembuana Als Lito Bin Sombadede Telembuana. Putusan tersebut menyatakan bahwa barang bukti berupa :³⁶

1. 1 (satu) buah linggis dengan panjang lebih kurang 100 cm (seratus sentimeter) ; Dirampas unttuk dimusnahkan

³⁴Wawancara dengan Bapak *encik*, Staf Bagian Pidana Umum Bagian Barang Bukti, 24 Oktober 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

³⁵Wawancara dengan Bapak Nur Winardi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 24 Oktober 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

³⁶Isi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 456/PID/B/2016/PN.RGT.tanggal 24 Oktober 2017.

2. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu (sudah dibelah ;Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) helai baju kemeja dengan lengan pendek warna putih garis-garis hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ; Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tanpa plat nomor polisi warna hitam ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga korban.

Pelaksanaan pengembalian barang bukti tindak pidana pembunuhan berencana sering menemui hambatan, baik itu dalam segi sarana prasarana / tempat penyimpanan barang bukti tersebut, serta sulitnya dalam menghubungi pemilik dari pemegang barang bukti yang telah mendapatkan putusan *inkracht* dari pengadilan yang disebabkan karena kurang lengkapnya penyidik / polisi dalam mengisi identitas para pihak.

Barang bukti itu sangat penting arti dan perannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya ke sidang pengadilan.Namun setelah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah kepala Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Menurut pendapat Ibu Siti Rahayu, hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti

oleh jaksa yakni meliputi beberapa hambatan dalam pengembalian barang bukti tersebut, untuk mengatasi kendala tersebut, maka menurut Ibu Siti Rahayu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan.³⁷

Upaya tersebut berupa diadakannya pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tambahan dilakukan untuk memperoleh kepastian, yang mana dengan cara pihak kejaksaan berkordinasi dengan pihak penyidik/penyidik pembantu, setelah diterima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dalam ketentuan KUHAP, maka jaksa penuntut umum segera mempelajari dan meneliti secara seksama kelengkapan berkas tersebut, apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil untuk dilimpahkan ke pengadilan.³⁸

Penelitian yang dilakukan jaksa penuntut umum antara lain :³⁹

- a. Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Keabsahan tindakan penyidik yang berkaitan dengan pengeledahan, penyitaan, laporan dan alat-alat bukti.
- c. Tindakan lain yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Setelah mempelajari apakah telah memenuhi syarat formil maka selanjutnya jaksa penuntut umum mempelajari dan meneliti isi serta materi berkas perkara hasil penyidikan apakah syarat materil telah terpenuhi yaitu apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk melakukan penuntutan dan mengajukannya ke sidang pengadilan.⁴⁰ Apabila dalam penelitian ternyata tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk yang jelas dan terperinci. Langkah upaya tersebut di wujudkan dengan harapan dapat menanggulangi pada permasalahan dari pihak kejaksaan yang mana memperlakukan berkas dari alamat para pihak yang ingin dikembalikan. Juga dalam penambahan ruangan sarana prasarana tempat penyimpanan

barang bukti khususnya kendaraan bermotor yang mana peneliti melihat gudang tersebut telah penuh dan dapat diperkirakan akan terjadinya penumpukan pada tempat penyimpanan tersebut.

Upaya dalam saling berkoordinasi kepada pihak penyidik juga akan membantu menemukan suatu kelengkapan berkas yang mana sebelumnya menjadi suatu permasalahan bagi pihak kejaksaan dikarenakan kurang lengkapnya informasi mengenai alamat yang akan dituju dalam tujuan memberikan surat pengembalian barang bukti kepada pihak yang paling berhak langsung ke alamatnya, dengan tidak lagi menitipkan kepada pihak rutan berkas pengambilan barang bukti tersebut, dengan begitu tujuan dari pihak jaksa akan tepat sasaran dan dalam proses pengembalian barang bukti tersebut juga akan lancar tanpa adanya permasalahan yang terus ada dan menyebabkan penumpukan dari barang bukti tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkecutan hukum tetap atas pengembalian barang bukti di kejaksaan negeri Indragiri hulu dilakukan dengan cara sebagai berikut, barang bukti dikembalikan kepada pemilik, yaitu setelah putusan *inkracht* Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHAP, harus mengembalikan barang bukti kepada yang berhak dengan prosedur yang telah ada.
2. Hambatan ataupun kendala dalam dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa adalah apabila dalam orang yang disebutkan dalam segi alamat kurang jelas ataupun tidak akurat yang membuat pihak kejaksaan kesulitan dalam mencari alamat dalam mengantar surat pemberitahuan pengambilan barang bukti, juga dalam pengembalian terkadang juga harus menunggu terdakwa bebas yang mana itu membutuhkan waktu dalam pengembalian sehingga membuat barang di gudang menumpuk terlalu lama.

³⁷Wawancara dengan Ibu Siti Rahayu, Jaksa Penuntut Umum, 24 oktober 2017, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

³⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 142.

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

- Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan ataupun kendala yang terjadi di Kejaksaan adalah dengan berkoordinasi dengan pihak penyidik untuk berkoordinasi dalam segi alamat yang kurang jelas serta bekerjasama dalam hal pengembalian barang bukti, juga memperbaharui dalam segi sarana prasarana khususnya pada tempat penyimpanan barang bukti di kantor Kejaksaan sehingga dalam penumpukan barang bukti dapat terkurangi atau teratasi dalam hal pengembalian barang bukti.

B. Saran

- Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) hendaknya segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda pelaksanaannya. Penyusun banyak menemukan bahwa di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu perintah putusan hakim yang *inkracht* tidak segera di eksekusi, eksekusi putusan baru dilaksanakan apabila barang bukti telah terkumpul banyak dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu karena barang tersebut lama tidak dipergunakan, maka banyak barang yang mengalami penurunan kondisi maupun nilai ekonomis. Oleh karena itu penyusun memberikan saran agar pihak Kejaksaan langsung melaksanakan tugas pada pengembalian barang bukti tersebut.
- Penambahan dan pemberharuan sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan. Meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk, dan juga diharapkan bagi pemerintah agar dapat membuat undang-undang yang menekankan barang bukti seharusnya ditempatkan di RUPBASAN bukan di Kejaksaan.
- Diharapkan bagi pemerintah agar dapat mengkoreksi serta menerapkan undang-undang yang mengatur mengenai jangka waktu dalam pengembalian barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asnawi, Natsir, M, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadic, Zaeni dan Rahman, Arif, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Efendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamzah, Andi, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makara, Taufik, Muhammad dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- M. Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum*

Kodrat dan Antimoni Nilai, Jakarta: Kompas.

Pangabean, P, H, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.

Paslyadja, Adnan, 1997, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Cetakan Pertama, Ghalia, Jakarta.

Prints, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta.

Sasongko, Haridan Rosita, Lili, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Sholehuddin, Muhammad, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soedjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofyan, Andy, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Bandung.

Tresna, R, 2000, *Komentar Hir*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Witanto, Yuti, Darmoko dan Kutawuringin, Negara, Putra, Arya, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Penegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal Hukum / Kamus / Skripsi

Charlie, Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

Denu, Pahlawardi, 2014, "Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Riau, Pekanbaru

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan

Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Widia, Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif. Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Laisana, Irvianti, 2013, "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti oleh Jaksa dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Production Sharing Contract, 2010, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 456/PID/B/2016/PN/RGT. Tanggal 05 Desember 2016

D. Website

Syukri, Muntasir, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas*,

<http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/> ,
03 Oktober 2017.

Danielle Geraldine, "The Role Of Evidence In The Settlement Of Criminal, Crishtoper, Vit as 273,1980, "*Jurnal West Law*", diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 november 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Timothy Mathew, Dispute Settlement Evidence, Crishtoper, Vit as 273, 1980, "*Jurnal West Law*" diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 november 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.